

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD)
KOTA PEMATANGSIANTAR**

¹Anggi Erlina, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

e – mail : herlinaanggi249@gmail.com

²Elfina Okto Posmaida Damanik, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

e – mail : elfinaopdse83@gmail.com

³Vitryani Tarigan, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

e – mail : vitry_tarigan@yahoo.com

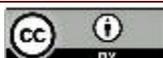
ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang menghambat masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dikategorikan sangat baik. Yang disebabkan oleh faktor usia produktif 35-45 (85,55%), jenis kelamin perempuan (76,22%), tingkat pendidikan S1/S2 (88,75%), pekerjaan dan penghasilan sebagai buruh (93,33%), dan lamanya tinggal 11-15 tahun (88,22%). Pengukuran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dilihat dari faktor pendidikan tamat SD/SMP/SLTA (57,62%) dikategorikan baik. Namun di tingkat pekerjaan dan penghasilan sebagai pedagang (37,55%) masih kurang baik dikarenakan kondisi ekonomi sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, diharapkan dari pihak petugas pajak maupun wajib pajak dapat bersama-sama meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan.

ABSTRACT

Land and Building Tax (PBB) is one of the sources of Regional Original Income (PAD) that can improve the welfare of the community. Community participation is one of the factors that prevent people from paying land and building taxes to improve people's welfare in all aspects of life. This research was conducted with the aim of knowing how community participation in paying building land tax in Siantar Barat District Pematangsiantar City. The research method used in this study was qualitative and quantitative methods using purposive sampling research. Data collection techniques were carried out by observation, interview, and documentation. The results showed that community participation as taxpayers in paying land building taxes in Siantar Barat District, Pematangsiantar City was categorized as very good which was caused by factors of productive age 35-45 (85,55%),



female gender (76,22%), education level S1/S2 (88,75%), employment and income as a laborer (93,33%), and length of stay 11-15 years (88,22%). Measurement of taxpayers in paying land and building taxes seen from the education factor after elementary/junior high school (57,62%) was categorized as good. However, at the level of employment and income as traders are still (37,55%) not good due to economic conditions that affect public participation in paying land and building taxes, land and buildings in West Siantar District, Pematangsiantar City.

Keywords : Community Participation, Land and Building Tax.

I. PENDAHULUAN

Suatu Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan pembangunan. Meningkatkannya kebutuhan pembangunan mendorong untuk meningkatkan pendapatan dan bersikap jujur dalam mengelola setiap pendapatan masuk maupun mengelola setiap pengeluaran. Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia secara efektif dan efisien.

Pajak memiliki dua jenis fungsi, sebagai penerimaan yaitu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Serta fungsi mengatur, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan dibidang keuangan dalam bidang ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan.

Pajak merupakan primadona dalam Negara karena sudah memberikan kontribusi yang sangat besar dan penerimaan pajak digunakan untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Agar pelaksanaan pembangunan berhasil maka diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat dalam pelaksanaannya pemerintah harus berusaha agar seluruh masyarakat berpartisipasi demi keberhasilan suatu pembangunan nasional.

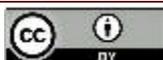
PBB merupakan pajak objektif, sehingga pajaknya berupa tanah atau bangunan. Yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan yang dimaksud dengan bumi merupakan permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan termasuk jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan diahlikan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikan PBB perdesaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. BPKD adalah perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:



1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Pematangsiantar?
2. Apa saja faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar?.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Pematangsiantar.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan masalah perpajakannya dan dapat membantu perusahaan dalam memberikan gambaran di bidang perpajakan.
2. Bagi pembaca
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah informasi dan wawasan serta dapat juga digunakan sebagai referensi penelitian dimasa yang akan datang.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 PARTISIPASI

Menurut (Ningrum, 2011:50), menyatakan bahwa Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinsiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

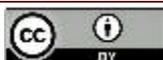
Partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan. Menurut Slamet, (dalam Wahyuni, 2020), Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, yaitu:

1. Faktor Usia
2. Faktor Jenis Kelamin
3. Faktor Pendidikan
4. Faktor Pekerjaan dan Penghasilan
5. Faktor Lamanya Tinggal

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku (Mardiasmo, 2016:3), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi - definisi diatas. Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dan rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbul (Kontraprestasi) dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.



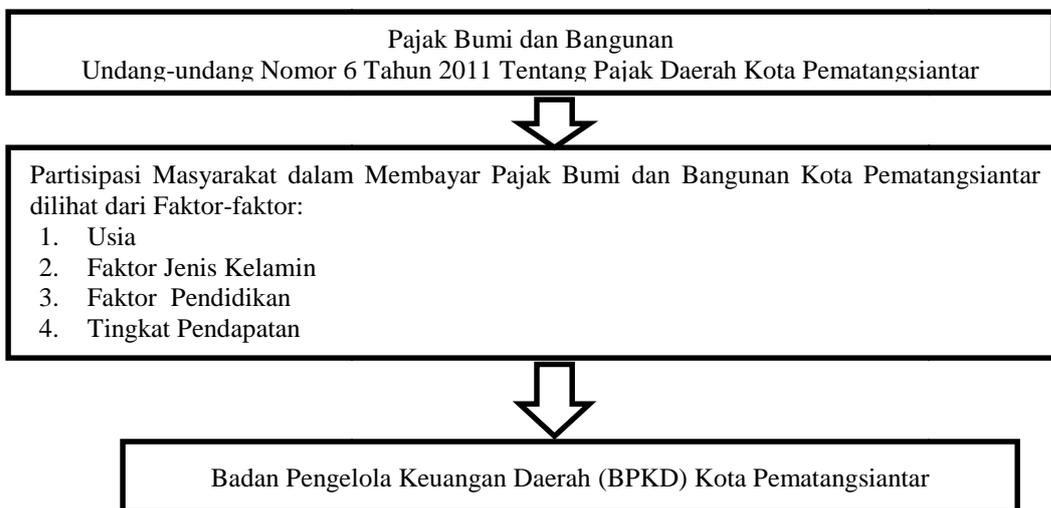
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut (TMbooks, 2013:242), menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Secara detail, pengertian bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.

Sedangkan pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.

Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui variabel yang lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain.

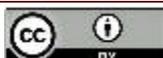
Desain penelitian adalah alat yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan. Desain penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian (perumusan masalah).

Menurut (Sugiyono, 2017:14), menyatakan bahwa ada 2 jenis desain penelitian, yaitu:

1. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka.
2. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema dan gambar.

Berdasarkan teori tersebut, maka dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan Kuantitatif yang akan diperoleh langsung dari perusahaan.

3.2 Populasi dan Sampel



Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat wajib pajak orang pribadi yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan di Kota Pematangsiantar. Dengan demikian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Wajib Pajak yang dikenakan PBB pada Tahun 2018-2020 di Kota Pematangsiantar yang terdiri dari 8 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Siantar Marihat
2. Kecamatan Siantar Marimbun
3. Kecamatan Siantar Selatan
4. Kecamatan Siantar Barat
5. Kecamatan Siantar Utara
6. Kecamatan Siantar Timur
7. Kecamatan Siantar Martoba
8. Kecamatan Siantar Sitalasari.

Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, artinya salah satu teknik sampling non random sampling, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian *purposive sampling* yaitu menentukan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Tahun 2018-2020 di Kota Pematangsiantar yang terdiri dari Kecamatan Siantar Barat 7 Kelurahan yaitu: Kelurahan Banjar, Kelurahan Bantan, Kelurahan Dwikora, Kelurahan Proklamasi, Kelurahan Simarito, Kelurahan Sipinggol-pinggol, dan Kelurahan Teladan.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara
2. Observasi dan
3. dokumentasi.

3.4 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data untuk memperoleh jawaban dan penjelasan yang akurat terkait partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar.

1. Redukasi data
2. Penyajian data
3. Kesimpulan atau verifikasi

Tabel 3.1

Indikator Pengukuran Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pematangsiantar

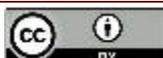
Persentase	Kriteria
76-100%	Sangat Baik
56-75%	Baik
40-55%	Cukup Baik
0-39%	Kurang Baik

Sumber: Suharsimi Arikunto (dalam Pertiwi, 2020)

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

Adapun jumlah wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) yang membayar pajak di Kecamatan



Siantar Barat Kota Pematangsiantar pada tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak PBB	Jumlah Wajib Pajak yang Membayar PBB	Jumlah Wajib Pajak yang Belum Membayar PBB	Persentase Jumlah Wajib Pajak yang Membayar (%)
1.	2018	7.622	4.415	3.207	57,92
2.	2019	7.742	4.520	3.222	58,38
3.	2020	7.776	4.550	3.226	58,51
Total		23.140	13.485	9.655	58,27

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar 2021.

Dari tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa, jumlah wajib pajak yang berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Kota Pematangsiantar belum baik. Dilihat dari wajib pajak setiap tahun dimulai dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 7.622 wajib pajak, namun yang membayar kewajibannya itu hanya 4.415 wajib pajak hingga mencapai 57,92%. Kemudian pada tahun 2019, wajib pajak yang terdaftar sebanyak 7.742 dan yang membayar hanya 4.520 wajib pajak mengalami peningkatan 0,46% yang artinya naik menjadi 58,38%. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah wajib pajak yang terdaftar lebih meningkat yaitu 7.776 wajib pajak, namun yang membayar juga semakin meningkat 4.550 wajib pajak 58,51 % yang berpartisipasi. Maka, dapat dilihat dari tahun 2018 hingga 2020 total wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar pada tahun 2018-2020 berjumlah 23.140 wajib pajak.

4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar

Adapun target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tahun 2018-2020.

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Tahun 2018-2020

No	Tahun	Target (Dalam Rp)	Realisasi (Dalam Rp)	Persentase (%)
1.	2018	1.474.201.773	1.076.929.611	73,05
2.	2019	1.584.831.453	1.201.330.121	75,80
3.	2020	1.589.475.546	1.213.696.815	76,35
Total		4.648.508.772	3.491.956.547	75,11

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar, 2021.

Dari tabel 4.2 maka dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun terakhir kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Meskipun dari tahun 2018 hingga tahun 2020 realisasi selalu meningkat namun masih jauh untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya. Bahkan persentase setiap tahun selalu naik, dilihat pada tahun 2018 persentase mencapai 73,05% , sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 75,80% dan pada tahun 2020 Realisasi penerimaan PBB meningkat hingga 76,35% dibanding tahun sebelumnya.

Pembahasan

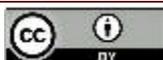
Untuk meningkatkan pembangunan serta mensejahterakan kehidupan di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tentu saja perlu adanya partisipasi masyarakat sebagai peran dari penduduk di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk memberikan pendapat, aspirasi,

pemikiran dan kepentingan agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam membayar pajak yang pemungutannya menggunakan sistem office assessment seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebagai hasil pajak yang dapat meningkatkan pemasukan daerah, realisasi penerimaan PBB dimasukkan agar pemerintah daerah dapat berperan secara maksimal guna memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal pembangunan dan penyediaan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan kepentingan tersebut, maka dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan pajak sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena PAD dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah supaya mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan potensi di daerah tersebut. Semakin tinggi pemasukan yang didapat dalam suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat diwujudkan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar jumlah wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2018 sampai tahun 2020 berjumlah 23.140 wajib pajak dan yang membayar 13.485 wajib pajak, persentase (57,27%) dengan tolak pengukuran 56-75% maka dikatakan baik. Dengan target Rp 4.492.513.922 dan terealisasi sebesar Rp 3.491.956.547, persentase (75,11%) dikatakan baik dengan tingkat pengukuran 56-75%, maka target dan realisasi penerimaan PBB tahun 2018 sampai 2020 masih belum memenuhi target yang ditentukan. Partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dilihat dari segi faktor usia. Faktor usia produktif yang sadar dalam membayar PBB di usia 35-45 tahun berjumlah 7.850 wajib pajak, persentase (85,05%) dikatakan sangat baik dengan tingkat pengukuran 76-100% lebih banyak dibandingkan jumlah wajib pajak yang membayar di usia 46-65 tahun berjumlah 5.635 wajib pajak, persentase (40,50%) dikatakan cukup baik dengan tingkat pengukuran 40-55%. Yang artinya semakin tua usia dalam membayar pajak, maka semakin berkurang kesadaran diri dalam membayar pajak. Dari segi faktor jenis kelamin bahwa wajib pajak yang membayar PBB berjenis kelamin laki-laki 8.500 wajib pajak, persentase (51,20%) dikatakan cukup baik dengan tingkat pengukuran 40-55% dan jumlah wajib pajak yang membayar berjenis kelamin perempuan 4.985 wajib pajak lebih banyak dibandingkan wajib pajak yang membayar laki-laki, persentase (76,22%) dikatakan sangat baik dengan tingkat pengukuran 76-100%. Dikarenakan perempuan lebih taat membayar PBB dibandingkan laki-laki. Maka dikatakan kesadaran diri laki-laki dan perempuan dalam membayar PBB baik. Faktor pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Wajib pajak membayar di tingkat pendidikan tamat SD/SMP/SLTA sebesar (57,62%) dikatakan baik dengan tingkat pengukuran 56-75% lebih rendah dari tingkat pendidikan tamat S1/S2 dengan persentase (88,75%) dikatakan sangat baik. Yang artinya semakin tinggi pendidikan wajib pajak, maka semakin tinggi lah kesadaran diri membayar PBB. Dimana mereka akan lebih paham dengan sanksi yang diberikan jika melakukan kelalaian dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB tingkat pekerjaan dan penghasilan pedagang (37,55%) masih dikatakan kurang baik dengan tingkat pengukuran 0-39%, dikarenakan pedagang kurang mengetahui sanksi kesadaran dalam membayar pajaknya. Dari segi faktor lamanya tinggal wajib pajak tersebut dapat disebabkan semakin lama wajib pajak tinggal, maka semakin berkurang terhadap kewajiban membayar pajak untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Karena dari hasil penelitian lamanya tinggal wajib pajak 11-15 tahun yang membayar PBB sebesar (88,22%) dikategorikan sangat baik dengan tingkat pengukuran 76-100%. Lamanya tinggal wajib pajak >20 tahun jumlah yang membayar pajak (49,25%) dikategorikan cukup baik dengan tingkat pengukuran 40-55%. Oleh karena itu, pihak yang terkait seperti Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar yang menangani segala macam keperluan serta kebutuhan pajak dapat semakin ditingkatkan pengawasannya agar tidak ada lagi wajib pajak yang menunggak untuk membayar pajak.

Hasil penelitian Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar akan



melakukan sosialisasi tentang pajak secara merata untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ada di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan sekitarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari keterangan maupun data-data yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka penulis memberi kesimpulan dan saran atas penelitian yang berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar”. Maka partisipasi wajib pajak dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut:

1. Partisipasi wajib pajak dalam membayar PBB dilihat dari faktor usia produktif 35-45 tahun dengan persentase (85,55%), jenis kelamin perempuan dengan persentase (76,22%), tingkat pendidikan S1/S2 dengan persentase (88,75%), pekerjaan dan penghasilan sebagai Buruh dengan persentase (93,33%), dan lamanya tinggal 11-15 tahun dengan persentase (88,22%) dikategorikan “sangat baik” dilihat tingkat pengukuran partisipasi pembayaran.
2. Pengukuran wajib pajak dalam membayar PBB dilihat dari faktor pendidikan tamat SD/SMP/SLTA (57,62%) dikategorikan “baik”.
3. Partisipasi wajib pajak di tingkat pengukuran “cukup baik” terdiri dari faktor usia produktif 46-65 tahun dengan persentase (40,50%), faktor jenis kelamin laki-laki dengan persentase (51,20%), dan faktor lamanya tinggal >20 tahun dengan persentase (49,25%).
4. Ditingkat faktor pekerjaan dan penghasilan pedagang dengan persentase (37,55%) dikategorikan “kurang baik”.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jelaskan, maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, antara lain:

1. Bagi pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar lebih meningkatkan sosialisasi terhadap faktor usia, faktor jenis kelamin, faktor pendidikan, faktor pekerjaan dan penghasilan, dan faktor lamanya tinggal. Agar wajib pajak lebih taat membayar PBB.
2. Bagi pihak wajib pajak pedagang akan diberikan pelatihan khusus kepada pedagang wajib pajak yang tidak sadar dalam membayar PBB, bahwa adanya sanksi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Karang Panimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. *Jurnal Vol 1 No 02*. <http://doi.org/10.36859/jap.V1i02.68>
- Anugrah, P. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Palaran Kota Samarinda. *Jurnal Volume 4 Nomor 3*. ejournal.an.fisip-unmul.ac.id
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi* (Edisi. XVI). C.V ANDI OFFSET.
- Mardiasmo. (2016). *PERPAJAKAN* (Edisi Terb). C.V ANDI OFFSET.
- Ningrum, S. I. A. D. (2011). *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka Belajar.
- Pasaribu, P. I. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempiap Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi*. <http://ejournalunsrat.ac.id>
- Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Pertiwi, M. I. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Membayar*



Jurnal Ilmiah AccUsi

<http://jurnal.usi.ac.id/index.php/ACCUSI/index>

Pajak Bumi dan Bangunan. <http://repository.uin-suska.ac.id>

Resmi, S. (2011). *PERPAJAKAN Teori dan Kasus* (Edisi 6, B). Salemba Empat. <http://www.penerbitsalemba.com>

Saputra Rizaldi. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2013. *Jom FISIP Volume 2 No 2- Oktober 2015*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

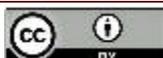
TMbooks. (2013). *PERPAJAKAN: Esensi dan Aplikasi*. ANDI.

Wahyuni, E. (2020). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. <https://repository.ar-raniry.ac.id>

waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 9 Bu). Salemba Empat. <http://www.penerbitsalemba.com>

Yuliani, A. Y. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Vol 2 No 1*. Anisyamn101@gmail.com

Lampiran



PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN PAJAK 2018-2020

TAHUN 2018

	JML_WP	POTENSI	JML_WP_BAYAR	JML_PENERIMAAN	WP_BELUM_BAYAR	SISA_PIUTANG	PERSENTASE PENERIMAAN (%)
SUKAMAJU	870	56,261,188	613	39,405,179	257	16,856,009	70.04
PARDAMEAN	680	38,381,370	310	18,291,122	370	20,090,248	47.66
SUKARAJA	1426	64,187,750	515	22,384,621	911	41,803,129	34.87
BP NAULI	1768	49,215,126	601	18,405,161	1167	30,809,965	37.40
MEKAR NAULI	814	24,950,695	281	9,264,494	533	15,686,201	37.13
SUKAMAKMUR	285	39,677,598	158	24,788,953	127	14,888,645	62.48
PARHORASAN NAULI	570	34,680,831	311	20,305,445	259	14,375,386	58.55
AEK NAULI	808	46,827,786	445	26,616,124	363	20,211,662	56.84
MARTIMBANG	853	77,264,145	507	46,768,893	346	30,495,252	60.53
KRISTEN	558	71,086,353	293	37,749,517	265	33,336,836	53.10
TOBA	508	55,868,041	291	34,494,583	217	21,373,458	61.74
KARO	895	111,627,318	453	80,546,714	442	31,080,604	72.16
SIMALUNGUN	691	105,476,446	457	87,458,049	234	18,018,397	82.92



SIPINGGOL-PINGGOL	874	56,470,559	492	34,030,878	382	22,439,681	60.26
TELADAN	530	125,132,513	316	90,425,355	214	34,707,158	72.26
DWIKORA	988	432,413,174	838	378,607,070	150	53,806,104	87.56
PROKLAMASI	796	517,871,376	538	368,479,903	258	149,391,473	71.15
TIMBANG GALUNG	917	253,217,294	566	197,586,549	351	55,630,745	78.03
SIMARITO	1316	93,878,389	681	50,200,513	635	43,677,876	53.47
BANJAR	1066	105,019,595	425	71,901,857	641	33,117,738	68.47
BANTAN	2052	143,416,167	1125	83,284,035	927	60,132,132	58.07
MARTOBA	1937	113,420,744	672	54,825,888	1265	58,594,856	48.34
MELAYU	2416	348,446,229	1419	267,277,428	997	81,168,801	76.71
BARU	1289	175,747,953	714	132,768,358	575	42,979,595	75.54
SUKADAME	1345	160,024,444	650	81,979,024	695	78,045,420	51.23
BANE	1764	158,585,146	837	93,219,270	927	65,365,876	58.78
SIGULANG-GULANG	1294	86,014,737	615	44,593,745	679	41,420,992	51.84
KAHEAN	1631	113,500,315	773	50,561,749	858	62,938,566	44.55
KEBUN SAYUR	982	82,223,484	497	46,398,791	485	35,824,693	56.43
TOMUAN	2080		1057		1023		63.61



		163,966,073		104,293,561		59,672,512	
PAHLAWAN	778	552,880,677	596	470,412,953	182	82,467,724	85.08
SIOPAT SUHU	2769	504,892,074	1740	389,563,104	1029	115,328,970	77.16
MERDEKA	750	146,061,888	472	105,013,300	278	41,048,588	71.90
PARDOMUAN	993	91,672,989	490	66,760,228	503	24,912,761	72.82
ASUHAN	962	77,253,756	408	47,252,198	554	30,001,558	61.16
SUMBER JAYA	2559	170,351,358	1107	78,368,250	1452	91,983,108	46.00
TAMBUN NABOLON	2674	453,210,635	873	345,555,344	1801	107,655,291	76.25
TANJUNG TONGAH	1170	324,735,812	462	217,357,495	708	107,378,317	66.93
NAGA PITU	1239	133,547,267	400	54,251,698	839	79,295,569	40.62
TANJUNG PINGGIR	2080	147,883,898	739	38,179,241	1341	109,704,657	25.82
NAGA PITA	2557	260,211,717	969	166,584,281	1588	93,627,436	64.02
PONDOK SAYUR	2395	258,405,637	914	115,073,020	1481	143,332,617	44.53
BAH SORMA	1695	69,560,691	460	20,750,834	1235	48,809,857	29.83
BUKIT SOFA	1337	157,554,771	652	87,614,881	685	69,939,890	55.61
SETIA NEGARA	2701	118,099,071	1121	47,299,719	1580	70,799,352	40.05
GURILLA	1111	53,009,233	441	21,236,366	670	31,772,867	40.06



BAH KAPUL	5223	325,343,688	1987	152,403,055	3236	172,940,633	46.84
SIMARIMBUN	1430	60,514,538	446	19,253,976	984	41,260,562	31.82
NAGA HUTA	1597	87,023,776	716	43,812,459	881	43,211,317	50.35
PEMATANG MARIHAT	1853	99,478,405	757	55,653,149	1096	43,825,256	55.94
TONG MARIMBUN	1586	71,149,627	484	25,141,000	1102	46,008,627	35.34
MARIHAT JAYA	1657	82,944,348	701	38,603,517	956	44,340,831	46.54
NAGA HUTA TIMUR	1174	51,929,624	522	24,109,288	652	27,820,336	46.43
TOTAL	76293	8,202,568,319	34907	5,247,162,185	41386	2,955,406,134	63.97

TAHUN PAJAK 2019						
JML_WP	POTENSI	JML_WP_BAYAR	JML_PENERIMAAN	WP_BELUM_BAYAR	SISA_PIUTANG	PERSENTASE
						PENERIMAAN (%)
886	66,067,846	646	48,522,776	240	17,545,070	73.44
686	43,606,191	340	21,656,688	346	21,949,503	49.66
1507	94,178,250	723	46,373,245	784	47,805,005	49.24
1837	84,424,528	704	33,245,569	1133	51,178,959	39.38
843	42,091,650	370	16,148,650	473	25,943,000	38.37
286	45,695,477	175	29,447,666	111	16,247,811	64.44
581	40,748,049	385	27,592,650	196	13,155,399	67.72
813	53,871,337	521	33,001,902	292	20,869,435	61.26
864	90,391,215	517	55,905,556	347	34,485,659	61.85



Jurnal Ilmiah AccUsi

<http://jurnal.usi.ac.id/index.php/ACCUSI/index>

569	80,813,412	321	44,892,861	248	35,920,551	55.55
518	65,850,899	286	40,686,963	232	25,163,936	61.79
906	118,830,762	527	88,153,394	379	30,677,368	74.18
692	114,344,765	435	92,661,598	257	21,683,167	81.04
879	63,653,717	569	42,936,955	310	20,716,762	67.45
532	140,624,612	331	98,265,096	201	42,359,516	69.88
988	456,063,600	860	399,589,385	128	56,474,215	87.62
796	548,761,894	520	438,650,296	276	110,111,598	79.93
925	270,052,888	570	208,630,518	355	61,422,370	77.26
1339	103,467,613	726	57,118,811	613	46,348,802	55.20
1091	113,405,638	463	77,736,398	628	35,669,240	68.55
2117	158,854,379	1051	87,033,180	1066	71,821,199	54.79
1965	127,502,756	830	67,386,872	1135	60,115,884	52.85
2423	375,717,355	1452	283,497,225	971	92,220,130	75.45
1303	192,183,258	809	143,987,157	494	48,196,101	74.92
1363	176,280,197	644	87,505,993	719	88,774,204	49.64
1804	191,302,150	814	104,215,284	990	87,086,866	54.48
1309	97,993,184	548	46,021,212	761	51,971,972	46.96
1648	127,750,384	795	59,638,887	853	68,111,497	46.68
985	90,960,127	538	53,776,609	447	37,183,518	59.12
2107	182,277,763	1143	116,798,084	964	65,479,679	64.08
778	583,771,642	616	490,588,344	162	93,183,298	84.04
2833	560,293,822	1832	431,481,925	1001	128,811,897	77.01
750	154,372,335	529	120,712,447	221	33,659,888	78.20



Jurnal Ilmiah AccUsi

<http://jurnal.usi.ac.id/index.php/ACCUSI/index>

1001	99,147,376	523	71,715,421	478	27,431,955	72.33
976	85,817,636	454	53,608,700	522	32,208,936	62.47
2797	211,431,137	1037	93,102,870	1760	118,328,267	44.03
2824	507,796,908	970	384,327,666	1854	123,469,242	75.69
1329	395,325,818	584	256,606,617	745	138,719,201	64.91
1251	148,012,603	452	52,848,345	799	95,164,258	35.71
2272	192,590,426	850	48,205,064	1422	144,385,362	25.03
2600	289,339,813	955	183,860,342	1645	105,479,471	63.54
2598	317,145,953	1069	116,731,218	1529	200,414,735	36.81
1797	89,325,900	570	27,661,675	1227	61,664,225	30.97
1348	172,113,816	652	96,148,560	696	75,965,256	55.86
3145	150,488,190	1490	63,266,782	1655	87,221,408	42.04
1211	72,667,375	566	30,790,759	645	41,876,616	42.37
5366	402,756,833	2017	202,645,498	3349	200,111,335	50.31
1507	72,341,751	549	22,677,939	958	49,663,812	31.35
1730	104,139,262	819	51,321,912	911	52,817,350	49.28
2022	117,689,199	922	65,181,314	1100	52,507,885	55.38
1624	86,199,348	505	32,679,884	1119	53,519,464	37.91
1737	99,594,219	820	48,749,307	917	50,844,912	48.95
1269	62,672,926	578	28,801,701	691	33,871,225	45.96
79327	9,332,800,184	37972	5,924,791,770	41355	3,408,008,414	63.48

TAHUN PAJAK 2020



JML_WP	POTENSI	JML_WP_BAYAR	JML_PENERIMAAN	WP_BELUM_BAYAR	SISA_PIUTANG	PERSENTASE
						PENERIMAAN (%)
895	65,758,627	663	47,881,133	232	17,877,494	72.81
701	44,052,970	406	24,413,704	295	19,639,266	55.42
1577	101,457,368	796	48,200,922	781	53,256,446	47.51
1752	78,436,240	778	33,195,775	974	45,240,465	42.32
904	43,912,508	403	17,499,888	501	26,412,620	39.85
287	44,982,014	172	28,281,165	115	16,700,849	62.87
600	41,382,975	384	25,581,668	216	15,801,307	61.82
816	52,982,755	596	34,831,085	220	18,151,670	65.74
870	91,256,316	515	52,837,286	355	38,419,030	57.90
581	83,841,687	320	43,310,956	261	40,530,731	51.66
522	67,752,367	268	35,925,230	254	31,827,137	53.02
912	119,302,011	459	85,764,573	453	33,537,438	71.89
692	112,341,347	461	92,714,965	231	19,626,382	82.53
883	62,903,964	531	40,877,953	352	22,026,011	64.98
525	139,329,164	321	90,141,074	204	49,188,090	64.70
990	452,430,025	870	408,439,782	120	43,990,243	90.28
796	557,615,088	528	450,460,640	268	107,154,448	80.78
939	271,725,717	578	206,280,831	361	65,444,886	75.92
1352	102,111,263	739	54,047,921	613	48,063,342	52.93
1102	113,930,802	488	79,379,661	614	34,551,141	69.67
2128	161,155,235	1073	90,349,784	1055	70,805,451	56.06
1988	127,618,029	836	61,641,656	1152	65,976,373	48.30



2428	375,495,752	1415	276,136,572	1013	99,359,180	73.54
1309	190,342,921	741	133,003,391	568	57,339,530	69.88
1385	175,009,352	656	93,439,887	729	81,569,465	53.39
1830	189,957,354	861	103,678,682	969	86,278,672	54.58
1321	99,437,302	543	45,417,565	778	54,019,737	45.67
1676	127,556,323	907	63,093,895	769	64,462,428	49.46
990	89,375,243	602	55,430,043	388	33,945,200	62.02
2143	180,922,275	1126	115,688,367	1017	65,233,908	63.94
781	575,198,148	575	455,142,237	206	120,055,911	79.13
2855	562,469,965	1681	420,475,402	1174	141,994,563	74.76
751	153,850,497	517	113,262,927	234	40,587,570	73.62
1008	98,481,918	459	70,364,098	549	28,117,820	71.45
981	85,857,925	402	45,523,872	579	40,334,053	53.02
3008	216,523,069	1102	89,274,692	1906	127,248,377	41.23
3047	518,485,176	1118	393,485,916	1929	124,999,260	75.89
1393	409,817,549	606	271,913,939	787	137,903,610	66.35
1263	148,396,726	423	51,085,541	840	97,311,185	34.42
2362	187,656,043	772	46,006,410	1590	141,649,633	24.52
2649	283,559,534	961	174,726,716	1688	108,832,818	61.62
2730	318,543,690	1129	121,416,090	1601	197,127,600	38.12
1919	95,697,521	700	33,335,377	1219	62,362,144	34.83
1365	173,048,784	691	99,120,639	674	73,928,145	57.28
3309	154,530,129	1677	68,166,204	1632	86,363,925	44.11
1282	75,341,835	572	31,542,829	710	43,799,006	41.87



Jurnal Ilmiah AccUsi

<http://jurnal.usi.ac.id/index.php/ACCUSI/index>

5529	409,969,472	2306	177,569,872	3223	232,399,600	43.31
1594	76,439,031	560	22,938,183	1034	53,500,848	30.01
1800	106,356,424	836	47,062,413	964	59,294,011	44.25
2155	121,003,975	897	58,966,507	1258	62,037,468	48.73
1676	87,788,291	482	31,596,954	1194	56,191,337	35.99
1821	104,124,245	774	44,099,026	1047	60,025,219	42.35
1374	64,869,165	544	27,673,376	830	37,195,789	42.66
81546	9392384106	38820	5,832,695,274	42726	3,559,688,832	62.10

